

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2014, *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, PT Toko Gunung Agung
- Arief, Nawawi, Barda, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Grup
- Arifin, Zainal, 2012, *Perkembangan Teknologi Kendaraan Bermotor, Bahan Refrensi Pelaksanaan Diklat Penyegaran Pusbang SDM Perhubungan Darat*, Jakarta
- Ashshofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga. Jakarta, Rineka Cipta
- Dimiyati, Khudzaifah, 2010, *Teoritisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990* Surakarta, Muhammadiyah University
- Ediwarman, 2015, *Monograf Metode Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Medan, Sofmedia
- Em Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, 2000, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta, Difa Publisher
- Friedman, M, Lawrence, 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal System A Social Science Perspective)*. Diterjemahkan oleh M. Khosim, Bandung, Nusa Media
- Fuady, Munir, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Griffin, Ricky W, 2004, *Manajemen*, Edisi Ketujuh, Jilid 1. Jakarta, Erlangga
- Hadi, Sutrisno, 1989, *Metodologi Research II*, Yogyakarta, Andi Offset
- Hamzah, Andi 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Mahmud M.D, 2014, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cet-6, Jakarta, PT. RajaGrafindoPersada
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, Yogyakarta, FH UII Press

- Mangkunegara, Prabu, Anwar, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung, Penerbit Remaja Rosdakarya
- Marzuki, Mahmud, Peter, 2011, *Penelitian Hukum, Cet. 7*, Jakarta, Kencana
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty
- _____ 2011, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya
- Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, The Habibie Centre
- Nasution, S, 1996, *Metode Research*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2003, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Media Elex Komputindo
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jakarta, Media Perkasa
- Rahardjo, D.M, 1999, *Intelektual, Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa*, Bandung, Mizan.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru
- _____ 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa
- _____ 2002, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Surakarta, Muhammadiyah University Press
- _____ 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- _____ 2009, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Salim, HS., 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Salim dan Nurbaini, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada

- Siagian P, Sondang, 2000, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta, Rineka Cipta
- Sidharta, Arief, B, 2008, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung, Refika Aditama
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, CV, Rajawali
- _____ 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- _____ 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet-3, Jakarta, UI-Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Sulaksono, 2011, *Rekayasa Jalan*, Bandung, Penerbit ITB
- Sulistyowati Irianto, Jan Michiel, Sebastiaan Pompe, Adriaan W. Bedner, Jacqueline Vel, Suzan Stoter, Julia Arnscheidt, 2012, *Kajian Sosio Legal*, Edisi Pertama, Denpasar, Pustaka Larasan
- Sulistyowati Irianto & Shidarta, 2011, *Metode Penelitian Hukum : Konstelasi & Refleks*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Utrecht, E/Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta, PT. Ichtiar Baru
- Warrasih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum Suatu Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryandaru Utama
- Winardi, 1996, *Perilaku Organisasi (Organizational Behaviour)*, Bandung, Tarsito.
- Wursanto, Ig. 1987, *Etika Komunikasi Kantor*, Yogyakarta, Kanisius

JURNAL DAN HASIL PENELITIAN

- Agus Setya Basuki, Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Perambahan Hutan Di Indonesia, *Jurnal Pascasarja Hukum UNS Edisi 5 Jan-Juni 2015* jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/pasca/article/download/663/621 diakses tanggal 16 Pebruari 2017 pukul 21.20 WIB
- Andrea R. Sumampow, Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas, *Jurnal Lex Crimen Vol.II/No.7/November/2013*, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3161>. diakses 03 Januari 2017 pukul 19.00 WIB

- Dian Novita Sari, Analisa Beban Kendaraan Terhadap Derajat Kerusakan Jalan dan Umur Sisa, *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan Vol. 2 No. 4 Desember 2014*, ejournal.unsri.ac.id/index.php/jtsl/article/view/1869/pdf. diakses 03 Januari 2017 pukul 19.30 WIB
- Eko Soponyono, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Berlalu Lintas*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI Jakarta, 2013, www.bphn.go.id/data/documents/lap_akhir_kajian_junef_2013.pdf... diakses 03 Januari 2017 pukul 20.00 WIB
- Faramita Nuriya Sari, Peran Polisi Lalu Lintas Menangani Penertiban Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Di Kota Samarinda, *Journal Administrasi Negara*, 4 (3) 2016: 4648-4660 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip.unmul.ac.id © Copyright 2016, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/.. diakses 03 Januari 2017 pukul 20.25 WIB
- Febrianti Kusumastuti, Upaya Satlantas Kepolisian Resort Kota Padang Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Padang, www.journal.unitas-pdg.ac.id/downloadfilemh.php... diakses tanggal 20 Pebruari 2017 pukul 20.30 WIB
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penegakan Hukum Kehutanan Di Indonesia, *Jurnal EKOSAINS Vol. IV / No. 2 | Juli 2012* download. portalgaruda.org/article.php?article.php?article=106978&val=4048 diakses tanggal 16 Pebruari 2017 pukul 20.30 WIB
- Jimly Asshiddiqie, Makalah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, Disampaikan pada acara Seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 17 Februari 2006.. www.jimly.com/makalah/namafile/4/pembangunan_dan_penegakan_hukum_1.doc diakses tanggal 15 Pebruari 2017 pukul 21.00 WIB
- Munawwaroh, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Perekonomian Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi, *Jurnal Kajian Ekonomi*, Juli 2013, Vol. II, No.03 download. portalgaruda.org/article.php?article diakses tanggal 16 Pebruari 2017 pukul 21.00 WIB
- Qamal, Koordinasi Kepolisian Dan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Becak Motor Di Kota Makassar, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 6 No. 1 Thn. 2016, ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/download/2153/1078... diakses tanggal 14 Pebruari 2017 pukul 21.00 WIB

Riawan, Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Yang Dimoderasi Dengan SIMDA Pada SKPD Kabupaten Buton Utara, *Jurnal JESP-Vol. 8, No 1 Maret 2016 ISSN (P) 2086-1575 E-ISSN 2502-7115 diakses tanggal 20 Pebruari 2017 pukul 21.00 WIB*

Safrudin, Penegakan Hukum Pidana dalam Proses Pemeriksaan Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru, *Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2014 download. portalgaruda.org/article.php... diakses tanggal 20 Pebruari 2017 pukul 20.00 WIB*

Tb. Ronny Rachman Nitibaskara, Budaya Hukum dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Awal Dimensi Budaya terhadap Perilaku Menyimpang), www.mahupiki.com/assets/news diakses tanggal 14 Pebruari 2017 pukul 20.25 WIB

Wahid Wahyudi, Pengaruh Muatan Lebih Beban Gandar Kendaraan Berat Angkutan Barang Terhadap Peningkatan Oksida Karbon, *Jurnal Transportasi Vol. 13 No. 2 Agustus 2013 : 85-92 download. portalgaruda.org/article.php?. diakses 03 Januari 2017 pukul 22.00 WIB*

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang RI Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Kendaraan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas)
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : Km 461 / Aj 403 / Phb – 82 Tentang Penataan Kembali Jembatan Timbang Di Jalan Raya
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : Sk.727/Aj.307/Drjd/2004 Tanggal : 30 April 2004 Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum Di Jalan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat

Keputusan bersama tentang Penerapan Denda Tilang antara Pengadilan Negeri Stabat, Kejaksaan Negeri Stabat, Polisi Resort Langkat dan Dinas Perhubungan Kabupaten tanggal 15 Nopember 2016 di Aula Wira Satya Polisi Resort Langkat

WEBSITE/INTERNET :

<https://polkam.go.id/announcement/>. diakses tanggal 3 Pebruari 2017 pukul 20.00 WIB

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/02/20/177775/Pungli-Kenapa-Masih-Tetap-Marak> diakses tanggal 3 Pebruari 2017 pukul 20.10 WIB

www.tribunnews.com > Regional > Sumatera diakses 02 Pebruari 2017 pukul 09.00 WIB

<https://ksemar.wordpress.com/category/lintas-berita/page/74> diakses 02 Pebruari 2017 pukul 10.00 WIB

<http://waspada.co.id/sumut/anggota-dprd-sumut-minta-kapolda-tertibkangalian-c-di-langkat/> diakses tanggal 3 Pebruari 2017 pukul 19.00 WIB

<https://www.langkatkab.go.id/page/40/perkebunan> diakses 3 Pebruari 2017 pukul 19.30 WIB

<http://old.langkatkab.go.id/read.php?do=detail&id=1428> diakses tanggal 3 Pebruari 2017 pukul 20,00 WIB

<http://www.lutfichakim.com/2012/03/meningkatkan-integritas-moral-dan.html> diakses tanggal 20 Pebruari 2017 pukul 19.30 WIB

<http://distamben.langkatkab.go.id/.../3-file.html> diakses 13 Pebruari 2017 pukul 20.00 WIB

<https://www.langkatkab.go.id/page/23/kecamatan> diakses tanggal 20 Pebruari 2017 pukul 12.15 WIB

WAWANCARA

Alders Syam Siahaan, SH, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, *wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat tanggal 16 Pebruari 2017*

Eli Daniel Sembiring, S.S.T (TD), PPNS LLAJ dan Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, *wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 13 dan 14 Pebruari 2017*

Gunawan, PPNS LLAJ dan Kepala Seksi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, *wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 13 dan 14 Pebruari 2017*

M. Zuhdi, PPNS LLAJ pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, *wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 13 dan 14 Pebruari 2017*

Menson Septo Putranta, AMd. LLAJ, SE, Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, *wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 14 Pebruari 2017*

Pujian Ginting, SH, MH, PPNS LLAJ dan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, *wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 15 Pebruari 2017*

SURAT KABAR

SKH Sinar Indonesia Baru (SIB), “*KNPI, OKP dan Ormas se-Wampu Datangi DPRD Langkat, Pertanyakan Peran Wakil Rakyat Terhadap Kerusakan Jalan Akibat Truk Galian C*”, Senin, 14 September 2015, Hal. 14

SKH Waspada, “*Belasan Kilometer Jalan Di Langkat Hancur*”, Senin, 28 September 2015, Hal. C1

SURAT SURAT

Surat Kepala Desa Alur Gadung Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat tanggal 12 September 2013

Surat Kepala Desa Psr VIII Namutrasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Nomor : 470-207/PsrVIII/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal *Penyetopan/Pelarangan Mobil Dam Truk yang tidak sesuai dengan Kapasitas Jalan*

Surat Camat Selesai Kabupaten Langkat Nomor 332-180/Trantib/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 perihal *Laporan Aksi Unjuk Rasa Warga Kelurahan Pekan Selesai*

Surat Masyarakat Desa Mekar Jaya Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat tanggal 17 September 2015 perihal *Surat Permohonan Masyarakat*. Surat Kepala Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat Nomor : 400-401/TG/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 perihal *Mohon Penertiban truk/kendaraan yang Melebihi Tonase*

Surat Pengusaha Angkutan Galian C Kabupaten Langkat tanggal 6 Juli 2015 dan Surat Asosiasi Pengusaha Komoditi Non Komoditi Dan Angkutan Truk Binjai Langkat tanggal 10 Juni 2016 perihal *Protes dan Keberatan Sekaligus Permohonan*

Surat PT. Pertamina Pangkalan Susu Nomor : 077/EP0212/2016-SO tanggal 7 Juni 2016 perihal Permohonan Ijin Melintas Jalan Kabupaten Langkat



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

RESPONDEN 1

Nama Responden : ALDERS SYAM SIAHAAN, SH
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat

Daftar Pertanyaan :

Apakah menurut Bapak penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan Kabupaten Langkat dapat dikenakan terhadap semua jenis kendaraan bermotor angkutan barang?

RESPONDEN 2

Nama Responden : PUJIAN GINTING, SH, MH
Jabatan : Sekretaris Dinas dan PPNS LLAJ
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat

Daftar Pertanyaan :

Apakah menurut Saudara ketentuan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditindaklanjuti semuanya?

RESPONDEN 3

Nama Responden : GUNAWAN
Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas dan PPNS LLAJ
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana tata cara pemeriksaan pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten terhadap kendaraan bermotor angkutan barang khusus?
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewenangan PPNS LLAJ dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten?
3. Apakah Saudara melihat perbedaan tata cara penindakan pelanggaran muatan angkutan barang di jalan nasional menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan di jalan kabupaten ? Jelaskan.
4. Apakah menurut Saudara PPNS LLAJ sudah mematuhi ketentuan menyerahkan berkas pelanggaran beserta barang bukti kepada Pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia?
5. Apakah menurut Saudara kuantitas SDM PPNS LLAJ dan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat telah mencukupi kebutuhan pengawasan muatan angkutan barang di jalan kabupaten?
6. Apakah menurut Saudara kuantitas dan kualitas peralatan pemeriksaan kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat telah mencukupi kebutuhan?

7. Bagaimana tata cara identifikasi pelanggaran daya angkut dan kelas jalan kabupaten oleh PPNS LLAJ apabila tidak tersedia alat penimbangan yang dapat dipindahkan?
8. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat dan PPNS LLAJ dengan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Langkat dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan kabupaten?
9. Apakah ditemukan hambatan-hambatan koordinasi dan komunikasi dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan antara PPNS LLAJ dan petugas Kepolisian?
10. Bagaimana penjelasan Saudara apabila pengemudi menanyakan prosedur pembayaran denda pelanggaran dan pengambilan barang bukti yang disita PPNS LLAJ?

RESPONDEN 4

Nama Responden : ELI DANIEL SEMBIRING, S.S.T (TD)
 Jabatan : PPNS LLAJ dan Penguji Kendaraan Bermotor
 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat

Daftar Pertanyaan :

1. Apa tindakan Saudara terhadap pelanggaran daya angkut yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang roda 4 (empat) sedangkan JBI dalam Buku Uji Berkala dibawah 8.000 kg?
2. Apakah menurut Saudara pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang telah memenuhi ketentuan tata cara pemuatan barang dalam bak terbuka?
3. Apakah menurut Saudara motivasi kerja PPNS LLAJ sudah tinggi dalam menegakkan peraturan lalu lintas angkutan jalan?
4. Bagaimana menurut Saudara strategi meningkatkan motivasi kerja PPNS LLAJ?
5. Apakah Saudara menemukan perbedaan hasil pengukuran dimensi kendaraan bermotor disaat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dengan data dimensi dalam Buku Uji Berkala?
6. Apakah disaat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala PPNS LLAJ dan petugas Kepolisian bekerja sesuai kewenangan masing-masing?
7. Apakah pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan kabupaten dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang efektif dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan?
8. Bagaimana tata cara identifikasi pelanggaran daya angkut dan kelas jalan kabupaten oleh PPNS LLAJ apabila tidak tersedia alat penimbangan yang dapat dipindahkan?
9. Apakah Saudara melihat ada diskriminasi atau perbedaan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengawasan muatan angkutan barang di jalan nasional menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dengan pengawasan muatan angkutan barang di jalan kabupaten menggunakan alat penimbangan yang dapat dipindahkan?
10. Apa menurut Saudara jalan Kabupaten Langkat telah dipasang rambu-rambu kelas jalan?

11. Apa dampaknya terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPNS LLAJ dan petugas Kepolisian apabila jalan Kabupaten Langkat belum dipasang rambu-rambu kelas jalan?

RESPONDEN 5

Nama Responden : M. ZUHDI

Jabatan : PPNS LLAJ pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat

Daftar Pertanyaan :

1. Apa tindakan Saudara terhadap pelanggaran daya angkut yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang roda 4 (empat) sedangkan JBI dalam Buku Uji Berkala dibawah 8.000 kg?
2. Apakah Saudara pernah bertanya kepada pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang mengapa mereka melakukan pelanggaran muatan angkutan barang di jalan Kabupaten Langkat? Apa jawabannya ?
3. Apakah Saudara pernah menemukan kendaraan bermotor angkutan barang dengan identitas yang sama (kesamaan nomor polisi, pengemudi, jenis kendaraan bermotor dan muatan barang) melakukan pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten secara terus-menerus ? Apabila pernah, apakah Saudara menanyakan apa alasan pengemudi terus-menerus melakukan pelanggaran ?
4. Apakah pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang mengetahui ketentuan muatan angkutan barang di jalan kabupaten ?
5. Apakah menurut Saudara PPNS LLAJ memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya?
6. Bagaimana menurut Saudara strategi meningkatkan komitmen PPNS LLAJ?
7. Bagaimana pendapat Saudara apabila PPNS LLAJ tidak memiliki integritas moral yang baik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya?
8. Menurut Saudara bagaimana strategi meningkatkan integritas moral PPNS LLAJ?
9. Bagaimana tata cara pemeriksaan pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten terhadap kendaraan bermotor angkutan barang khusus?
10. Bagaimana bentuk pelanggaran ketentuan muatan angkutan barang yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor angkutan khusus peti kemas yang Saudara temukan di jalan Kabupaten Langkat?
11. Bagaimana tata cara penindakan oleh PPNS LLAJ terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan Kabupaten Langkat yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor angkutan khusus peti kemas?
12. Bagaimana tata cara identifikasi pelanggaran daya angkut dan kelas jalan kabupaten oleh PPNS LLAJ apabila tidak tersedia alat penimbangan yang dapat dipindahkan?
13. Apa saja kebutuhan perlengkapan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten?
14. Apakah disaat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala PPNS LLAJ dan petugas Kepolisian bekerja sesuai kewenangan masing-masing?

15. Apa saja hambatan yang Saudara temukan dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan kabupaten?

RESPONDEN 6

Nama Responden : MENSION SEPTO PUTRANTA, AMd. LLAJ, SE

Jabatan : Penguji Kendaraan Bermotor
Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah Saudara pernah menemukan pelanggaran dimensi di saat melakukan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor di gedung Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat?
2. Apa saja jenis pelanggaran dimensi kendaraan bermotor yang Saudara temukan di saat melakukan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor di gedung Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat?
3. Apa tindakan Saudara apabila menemukan pelanggaran dimensi di saat melakukan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor di gedung Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat?



